

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator fundamental kemajuan suatu wilayah, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sering digunakan sebagai ukuran utama kesejahteraan ekonomi penduduknya. Indikator ini merepresentasikan nilai rata-rata barang dan jasa yang dihasilkan per penduduk dalam suatu daerah pada periode tertentu, sehingga secara teoritis mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan mendistribusikan hasil pembangunannya (Miftah et al., 2025). Secara konseptual, PDRB per kapita menjadi tolak ukur penting dalam menilai keberhasilan kebijakan ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan (Todaro & Smith, 2020). Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dijelaskan melalui fungsi produksi Cobb-Douglas Production Function yang menyatakan bahwa output ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal (*capital stock*), tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan investasi akan menambah stok modal produksi, sementara kualitas tenaga kerja yang tercermin dari pendidikan serta kebijakan upah dapat memengaruhi produktivitas tenaga kerja. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti akses internet dapat meningkatkan efisiensi dan difusi informasi dalam kegiatan ekonomi. Perbedaan akumulasi faktor-faktor produksi tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan perbedaan tingkat PDRB per kapita antar wilayah.

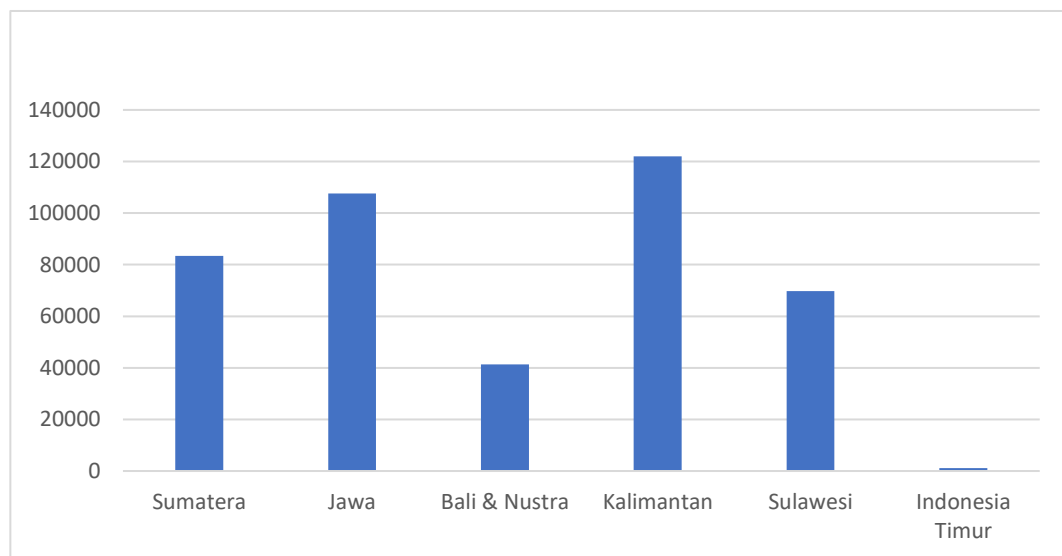
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk pada suatu daerah atau total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai produk Domestik Regional Bruto per kapita dapat menjelaskan seberapa besar kemampuan daerah untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang ada. Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga berlaku merupakan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah dalam satu tahun, dihitung dengan membagi total nilai barang dan jasa yang diproduksi (PDRB) menggunakan harga berlaku saat ini, dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini sering digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi di suatu wilayah. Dengan demikian, peningkatan PDRB per kapita menjadi sinonim dari peningkatan produktivitas kolektif dan pada akhirnya, peningkatan standar hidup masyarakat. Konteks geografis Indonesia memberikan narasi yang unik, di mana pertumbuhan nasional sangat bergantung pada dinamika di Pulau Jawa. Sebagai episentrum ekonomi, Pulau Jawa bukan sekedar pulau berpenduduk padat, ia adalah *powerhouse* yang menyumbang lebih dari 58% terhadap PDRB nasional dan menampung sekitar 56% total populasi di Indonesia (Anggara, 2024). Kontribusi yang sedemikian besar ini menempatkan Jawa sebagai barometer sekaligus garda terdepan perekonomian nasional, gejolak atau stagnasi di Jawa akan berpengaruh langsung ke stabilitas ekonomi di Indonesia secara keseluruhan. Dominasi ini menjadikan Jawa sebagai *Primus inter pares* dalam perekonomian nasional, di mana stabilitas dan pertumbuhannya secara langsung memengaruhi kesehatan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Namun, di balik

kontribusi agregatnya yang besar, Pulau Jawa menyimpan paradoks pembangunan yang kompleks. Meski menjadi lokomotif ekonomi, rata-rata PDRB per kapita Jawa secara keseluruhan justru tidak selalu menjadi yang tertinggi dibandingkan pulau-pulau lain yang kaya sumber daya alam, seperti Sumatera dan Kalimantan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mengungkapkan adanya disparitas Produk Domestik Regional Bruto per kapita yang mencolok antarpulau, di mana kekayaan sumber daya alam belum serta-merta terkonversi menjadi kesejahteraan yang merata bagi penduduknya. Dalam paradigma baru ini, faktor produksi konvensional seperti lahan dan modal fisik (mesin) tidak lagi cukup, mereka harus disinergikan dengan modal manusia yang terdidik dan terampil, serta infrastruktur digital yang memadai. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah mengubah cara memproduksi, berdistribusi, dan berkonsumsi, mendorong efisiensi, menciptakan pasar baru, dan menjadi *enabler* bagi sektor-sektor ekonomi kreatif dan jasa modern. Oleh karena itu, analisis pertumbuhan ekonomi regional di Jawa pada periode ini harus mempertimbangkan dimensi transformatif, tidak lagi berpatok hanya pada variabel-variabel ekonomi klasik semata. Pola konvergensi atau pemerataan antardaerah di Indonesia masih menjadi tantangan kompleks yang perlu diurai dengan pendekatan multidimensi (Kurniawan & Managi, 2018).

Produk Domestik Regional Bruto per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan rata-rata pendapatan masyarakat suatu wilayah dan mencerminkan keberhasilan distribusi hasil pembangunan (Todaro & Smith, 2020). Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi secara

agregat, kenyataannya masih banyak provinsi yang tertinggal dari segi kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, terdapat disparitas Produk Domestik Regional Bruto per kapita yang mencolok antarpulau di Indonesia. Pulau Kalimantan mencatat rata-rata Produk Domestik Regional Bruto per kapita tertinggi, diikuti oleh Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Bali dan Nusra dan terakhir Pulau Indonesia Timur. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam, belum tentu sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh wilayah Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah 2026)

Gambar 1. 1 PDRB Per Kapita Antar Pulau di Indonesia Tahun 2024 (Ribu Rupiah)

Gambar di atas mengungkapkan paradoks pembangunan Indonesia, di mana beberapa provinsi kaya sumber daya seperti Kalimantan dan Pulau Sumatera mencatatkan Produk Domestik Regional Bruto per kapita yang sangat tinggi, sementara provinsi-provinsi besar di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Barat,

atau DI Yogyakarta justru memiliki angka yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan dominasi suatu wilayah terhadap total Produk Domestik Regional Bruto nasional belum tentu sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat secara rata-rata. Artinya, kontribusi terhadap total output regional nasional tidak identik dengan kesejahteraan per individu di wilayah tersebut.

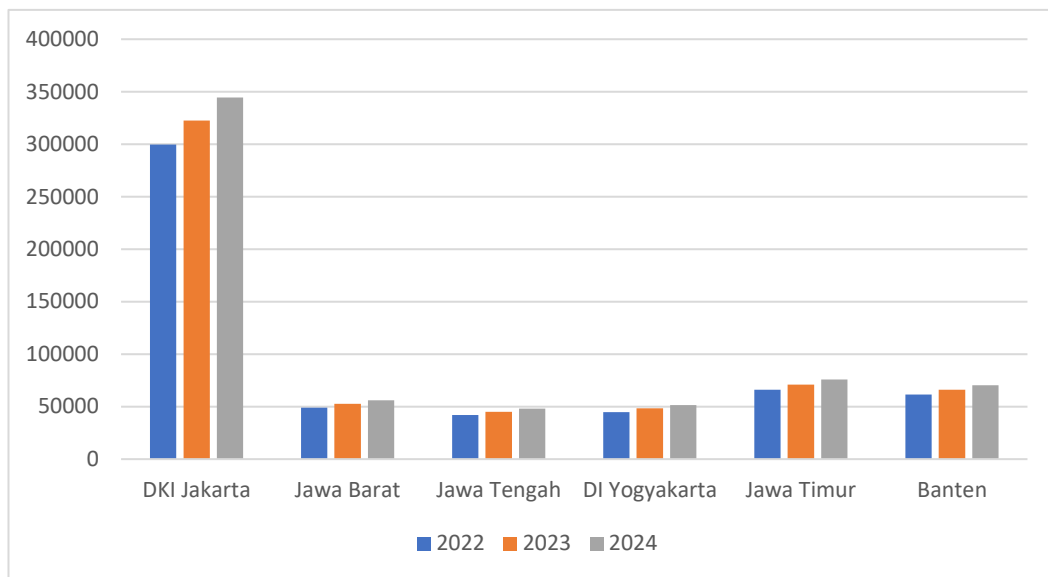
Meskipun Pulau Jawa tidak memiliki rata-rata Produk Domestik Regional Bruto per kapita tertinggi dibandingkan pulau lain, serta menempati posisi kedua sebagai pulau dengan PDRB per kapita tertinggi wilayah ini memiliki urgensi dan kompleksitas yang sangat penting untuk diteliti. Pertama, Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi nasional yang berkontribusi sekitar 58% terhadap total Produk Domestik Regional Bruto nasional (Anggara, 2024), menjadikannya tulang punggung perekonomian Indonesia. Kedua, dengan populasi lebih dari 151 juta jiwa atau sekitar 56% dari total penduduk Indonesia yang terkonsentrasi di wilayah seluas hanya 6,8% dari total luas daratan Indonesia, Pulau Jawa menghadapi tantangan densitas ekonomi dan demografis yang unik (Badan Pusat Statistik, 2022). Ketiga, sebagai lokasi ibu kota negara dan pusat industri manufaktur terbesar, kebijakan ekonomi yang diterapkan di Pulau Jawa memiliki efek *spillover* yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi Pulau Jawa membandingkan PDRB per kapita antar pulau di Indonesia. Perbandingan antar pulau ini penting untuk menilai sejauh mana dominasi ekonomi Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau lain, sekaligus

mengidentifikasi ketimpangan pembangunan regional yang terjadi pada tingkat antarwilayah besar di Indonesia.

Hal yang lebih menarik lagi, di balik dominasi ekonomi nasionalnya, Pulau Jawa justru menunjukkan ketimpangan internal yang sangat tajam. Pulau Jawa terdiri dari enam provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur yang secara geografis berdekatan, namun menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal Produk Domestik Regional Bruto per kapita (BPS, 2025).

Fenomena yang lebih mengkhawatirkan justru terjadi di dalam internal Pulau Jawa itu sendiri. Jawa yang terdiri atas enam provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten menunjukkan ketimpangan ekonomi yang sangat ekstrem dan cenderung melebar. Data tahun 2021-2023 (BPS, 2025) menunjukkan DKI Jakarta secara konsisten memiliki PDRB per kapita yang jauh melampaui provinsi lainnya. Pada tahun 2023, rasio PDRB per kapita DKI Jakarta terhadap Jawa Tengah telah mencapai 6,6:1, meningkat dari 5,4:1 pada tahun 2018 (Zulhija & Benardin, 2025).



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah 2026)

Gambar 1. 2 PDRB Per Kapita 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2022-2024 (Ribu Rupiah)

Berdasarkan Gambar di atas PDRB per kapita enam provinsi di Pulau Jawa pada periode 2022-2024, terlihat adanya kecenderungan peningkatan PDRB per kapita di seluruh provinsi, yang mencerminkan proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi regional pascapandemi. Namun demikian, peningkatan tersebut belum diikuti oleh pemerataan tingkat kesejahteraan antarwilayah. DKI Jakarta secara konsisten mencatat PDRB per kapita tertinggi dengan selisih yang sangat signifikan dibandingkan dengan provinsi lainnya yang menunjukkan kuatnya konsentrasi aktivitas ekonomi, sektor jasa modern, serta produktivitas tenaga kerja yang tinggi di wilayah tersebut. Sementara itu, provinsi-provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta masih berada pada level PDRB per kapita yang relatif lebih rendah meskipun memiliki kontribusi ekonomi yang besar secara agregat.

Pola PDRB per kapita tersebut tidak dapat dilepaskan dari perbedaan jumlah dan struktur penduduk antarprovinsi di Pulau Jawa. Secara konseptual, PDRB per

kapita merupakan rasio antara total output ekonomi dengan jumlah penduduk, sehingga wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif lebih kecil tetapi memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi cenderung mencatat PDRB per kapita yang lebih besar. Kondisi ini tercermin pada DKI Jakarta yang meskipun memiliki jumlah penduduk lebih sedikit dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur mampu menghasilkan PDRB per kapita tertinggi karena tingginya konsentrasi sektor jasa modern, pusat keuangan, serta kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi yang tidak sebanding dengan besarnya populasi. Sebaliknya, provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta memiliki jumlah penduduk yang besar dengan dominasi sektor padat karya dan produktivitas relatif lebih rendah, sehingga output ekonomi yang dihasilkan harus dibagi kepada populasi yang lebih besar. Akibatnya, meskipun secara agregat kontribusi PDRB provinsi-provinsi tersebut cukup signifikan terhadap perekonomian Pulau Jawa, nilai PDRB per kapita yang dihasilkan masih relatif lebih rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingginya jumlah penduduk tanpa diimbangi peningkatan produktivitas dan kualitas struktur ekonomi dapat menjadi faktor penekan tingkat pendapatan per kapita sekaligus menjelaskan terjadinya ketimpangan kesejahteraan antarwilayah di Pulau Jawa.

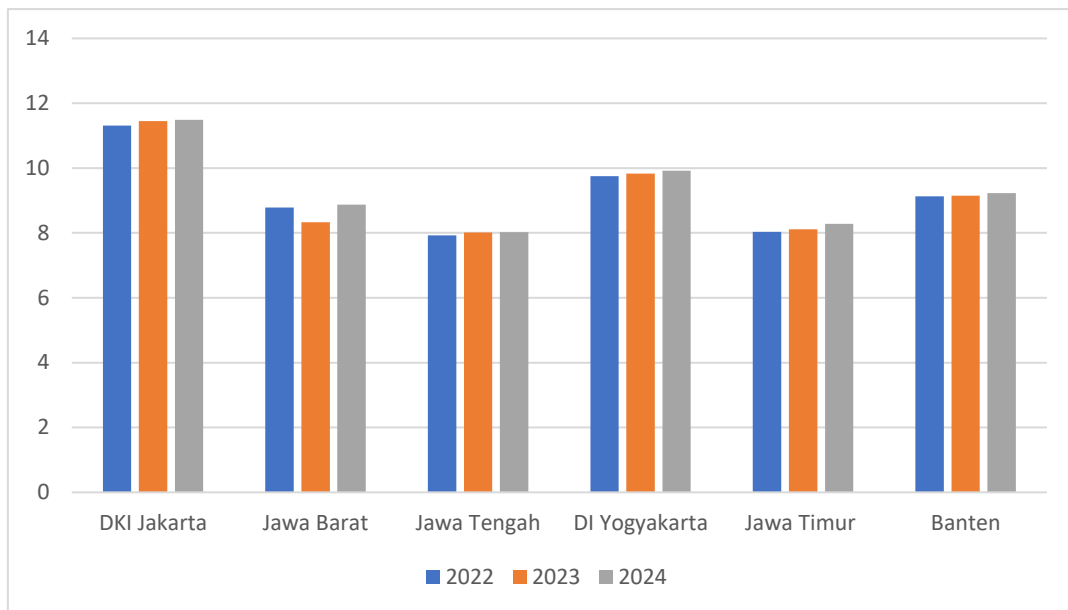
Perbedaan PDRB per kapita antarprovinsi di Pulau Jawa mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan ekonomi regional yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi, kualitas sumber daya manusia, tingkat industrialisasi, serta karakteristik demografis. Provinsi dengan dominasi sektor industri bernilai tambah tinggi dan jasa modern, seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur cenderung memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain yang

didominasi oleh sektor padat karya berupah rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif dan masih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu. Oleh karena itu, fenomena ketimpangan PDRB per kapita antarprovinsi di Pulau Jawa menjadi isu penting untuk dikaji lebih lanjut guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan kesejahteraan masyarakat serta sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan regional yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam perspektif teori pertumbuhan ekonomi endogen yang dikemukakan oleh Paul Romer dan dikembangkan lebih lanjut oleh Permana & Setyowati (2025), faktor-faktor internal seperti pendidikan, investasi, dan kualitas sumber daya manusia merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka Panjang. Selain itu, dalam konteks perkembangan ekonomi modern, infrastruktur digital juga menjadi bagian integral dari faktor internal tersebut karena berperan sebagai medium difusi pengetahuan, inovasi, dan teknologi yang memperkuat akumulasi modal manusia serta meningkatkan produktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Konsep ini relevan dalam menganalisis determinan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Pulau Jawa, karena variabel seperti Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Upah Minimum Provinsi (UMP), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Akses Internet (AI) diduga memainkan peran strategis dalam mendorong kesejahteraan ekonomi regional dari dalam sistem produksinya. Teori pertumbuhan endogen memprediksi bahwa daerah dengan investasi yang lebih besar pada faktor-faktor internal ini akan mengalami pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan kesejahteraan yang lebih tinggi.

Salah satu faktor penting tersebut yaitu kualitas sumber daya manusia, yang dapat diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka produktivitas tenaga kerja cenderung meningkat, sehingga mampu mendorong peningkatan output dan pendapatan per kapita. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Dengan melihat batas maksimum dan minimum untuk rata-rata lama sekolah. Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah 15 Tahun dan batas minimum adalah 0 Tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan setara lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) (Nurfitri, 2021). Teori modal manusia menyebutkan manusia dengan tingkat pendidikan tinggi dilihat dari lamanya waktu sekolah berkesempatan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding manusia dengan tingkat pendidikan lebih rendah. Rata-rata lama sekolah merefleksikan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dipunyai tenaga kerja di suatu wilayah. Tenaga kerja yang lebih terdidik dan terampil cenderung lebih produktif. Selain itu, tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan munculnya inovasi dan penggunaan teknologi yang lebih canggih. Hal ini tentu dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mendorong peningkatan PDRB. Kemudahan dalam mengakses pendidikan akan membantu masyarakat mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi (Feniser et al., 2022).



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah 2026)

Gambar 1. 3 Rata-Rata Lama Sekolah 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2022-2024 (Tahun)

Berdasarkan Gambar di atas, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) enam provinsi di Pulau Jawa pada periode 2022-2024, terlihat bahwa seluruh provinsi mengalami peningkatan RLS dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam capaian pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas di Pulau Jawa.

DKI Jakarta secara konsisten mencatat RLS tertinggi berada di atas 11 tahun yang menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata telah menamatkan pendidikan setara dengan sekolah menengah atas. Sementara itu, DI Yogyakarta berada pada posisi relatif tinggi dengan RLS mendekati 10 tahun, mencerminkan kuatnya peran wilayah ini sebagai pusat pendidikan dan keberadaan berbagai institusi pendidikan menengah dan tinggi. Sebaliknya, Jawa Tengah dan Jawa Timur masih memiliki RLS yang relatif lebih rendah berada di kisaran 8

tahun, yang menunjukkan bahwa rata-rata penduduk belum sepenuhnya menyelesaikan pendidikan menengah atas.

Fenomena yang menarik yaitu adanya disparitas rata-rata lama sekolah yang sangat ekstrem antar provinsi di Pulau Jawa. Rata-rata lama sekolah DKI Jakarta pada tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah provinsi lainnya. Perbedaan ini mencerminkan adanya disparitas pendidikan antar provinsi yang signifikan.

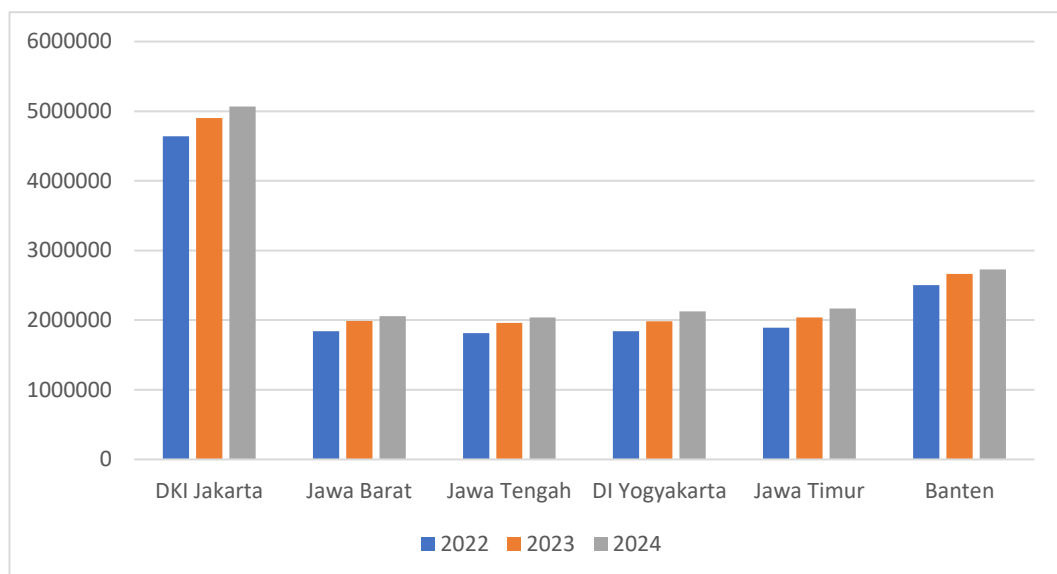
Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah memiliki keterkaitan yang erat dengan *income per capita* atau PDRB per kapita melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi RLS, semakin besar pula akumulasi modal manusia (*human capital*) yang dimiliki penduduk yang tercermin dalam peningkatan keterampilan, kemampuan kognitif, serta adaptasi terhadap teknologi dan inovasi. Kondisi ini mendorong tenaga kerja untuk masuk ke sektor-sektor ekonomi dengan nilai tambah dan tingkat upah yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan pendapatan individu dan pada akhirnya menaikkan PDRB per kapita suatu wilayah. Selain itu, wilayah dengan RLS lebih tinggi cenderung lebih menarik bagi investasi, khususnya pada sektor industri modern dan jasa, karena ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan produktif. Dengan demikian, peningkatan RLS tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat secara langsung, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah secara keseluruhan yang tercermin dalam peningkatan PDRB per kapita dan perbaikan tingkat kesejahteraan.

Pendidikan yang lebih baik nantinya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan tingkat produktivitas tenaga kerja akan berpengaruh terhadap upah yang diterima prakerja (Sheehan & Shi, 2019). Upah Minimum Provinsi (UMP) juga menjadi variabel penting yang memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat di tingkat regional. Upah Minimum Provinsi berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya melindungi kesejahteraan pekerja, tetapi juga berdampak pada daya beli masyarakat serta konsumsi domestik. Upah minimum merupakan gaji bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, dan berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan yang bersangkutan. Upah minimum juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya upah minimum merupakan komponen penting dalam pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Upah minimum berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu untuk tenaga kerja dalam pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran.

Secara teoritis, peningkatan upah minimum dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan konsumsi rumah tangga dan kesejahteraan pekerja. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) menemukan bahwa upah minimum memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Sementara itu, penelitian oleh Pratama (2021) menunjukkan bahwa pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung berbeda

antarwilayah tergantung pada struktur ekonomi daerah. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh upah minimum terhadap kondisi ekonomi regional masih menjadi isu yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Teori Upah Efisiensi menjelaskan bahwa pemberian upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan produktivitas melalui peningkatan motivasi kerja, perbaikan nutrisi, serta penurunan angka pergantian tenaga kerja. Dengan demikian, kenaikan upah dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Faizin, 2021). Upah Minimum Provinsi juga merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial pemerintah untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja dengan menetapkan batas minimum yang adil (Akbar, 2022).



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah 2026)

Gambar 1. 4 Upah Minimum 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2022-2023 (Rupiah)

Berdasarkan Gambar di atas, terlihat bahwa seluruh provinsi mengalami kenaikan UMP secara konsisten setiap tahunnya. Kenaikan ini mencerminkan adanya kebijakan penyesuaian upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah

daerah sebagai bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja serta upaya menjaga daya beli pekerja di tengah dinamika perekonomian.

DKI Jakarta secara konsisten memiliki UMP tertinggi dibandingkan provinsi lain, tingginya UMP di DKI Jakarta dipengaruhi oleh tingkat biaya hidup yang relatif lebih tinggi, struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor jasa dan industri bernilai tambah tinggi, serta produktivitas tenaga kerja yang lebih besar. kondisi ini menjadikan DKI Jakarta sebagai *benchmark* penetapan upah di wilayah Pulau Jawa. Banten menempati posisi kedua setelah DKI Jakarta dengan UMP yang relatif tinggi. Fenomena ini berkaitan dengan peran banten sebagai kawasan industri dan wilayah penyangga ibu kota, di mana keberadaan kawasan manufaktur dan logistik mendorong penetapan upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur berada pada kelompok UMP menengah hingga rendah, meskipun tetap menunjukkan tren peningkatan setiap tahun.

Secara fenomenologis, kenaikan UMP pada periode 2022-2024 tidak terlepas dari pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, meningkatnya inflasi, serta penyesuaian formula penetapan upah minimum sesuai dengan regulasi pemerintah. Pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan antara kepentingan pekerja untuk memperoleh upah layak dan kemampuan dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja. Namun demikian, disparitas UMP antarprovinsi di Pulau Jawa masih cukup besar yang berpotensi memengaruhi mobilitas tenaga kerja antarwilayah dan distribusi kegiatan ekonomi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa

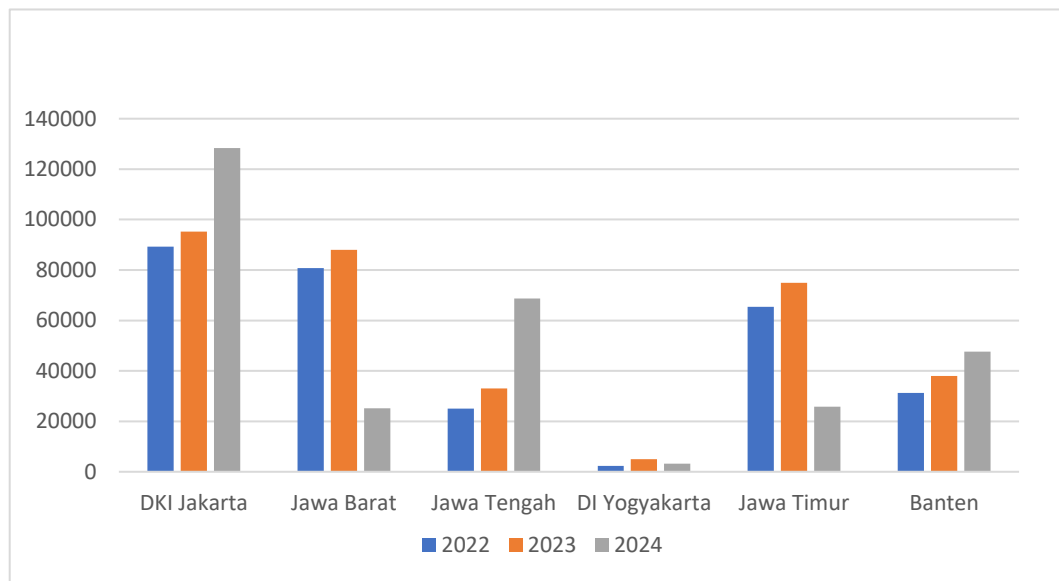
kebijakan upah minimum tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif, tetapi juga oleh kondisi ekonomi, produktivitas, dan struktur industri masing-masing daerah.

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki keterkaitan yang erat dengan peningkatan *income per capita* atau PDRB per kapita suatu daerah. Secara konseptual, UMP berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk menjamin tingkat pendapatan minimum pekerja, sehingga ketika UMP meningkat, pendapatan riil tenaga kerja khususnya pada sektor formal juga cenderung meningkat. Peningkatan pendapatan ini akan mendorong daya beli masyarakat yang selanjutnya meningkatkan konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama dalam pembentukan PDRB. Dengan meningkatnya nilai tambah yang dihasilkan melalui aktivitas produksi dan konsumsi, PDRB per kapita berpotensi mengalami kenaikan seiring dengan perbaikan distribusi pendapatan di wilayah tersebut.

Selain Upah Minimum Provinsi, peningkatan investasi merupakan faktor krusial dalam menentukan tingkat pendapatan dan dinamika perekonomian. Aktivitas investasi memungkinkan perekonomian suatu wilayah untuk terus berkembang melalui peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan nasional yang pada akhirnya berdampak pada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, investasi memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di Indonesia, investasi diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta domestik, serta Penanaman Modal Asing (PMA) yang berasal dari pihak luar negeri. Kedua jenis investasi tersebut memiliki kontribusi yang sama

pentingnya dalam memperkuat struktur ekonomi dan meningkatkan kinerja pembangunan nasional.

Tidak hanya sektor swasta, pemerintah juga berperan aktif dalam kegiatan investasi melalui pengeluaran belanja modal. Belanja modal pemerintah mencerminkan investasi publik yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan penambaham aset tetap guna menunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Pengeluaran ini mencakup pembiayaan pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur pendukung lainnya yang berfungsi sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi regional. Belanja modal pemerintah memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi (Waryanto, 2017). Selain itu, pembentukan modal khususnya investasi swasta, menjadi perhatian utama karena mampu menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat (Todaro & Smith, 2020).



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah 2026)

Gambar 1. 5 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2022-2024 (Miliar Rupiah)

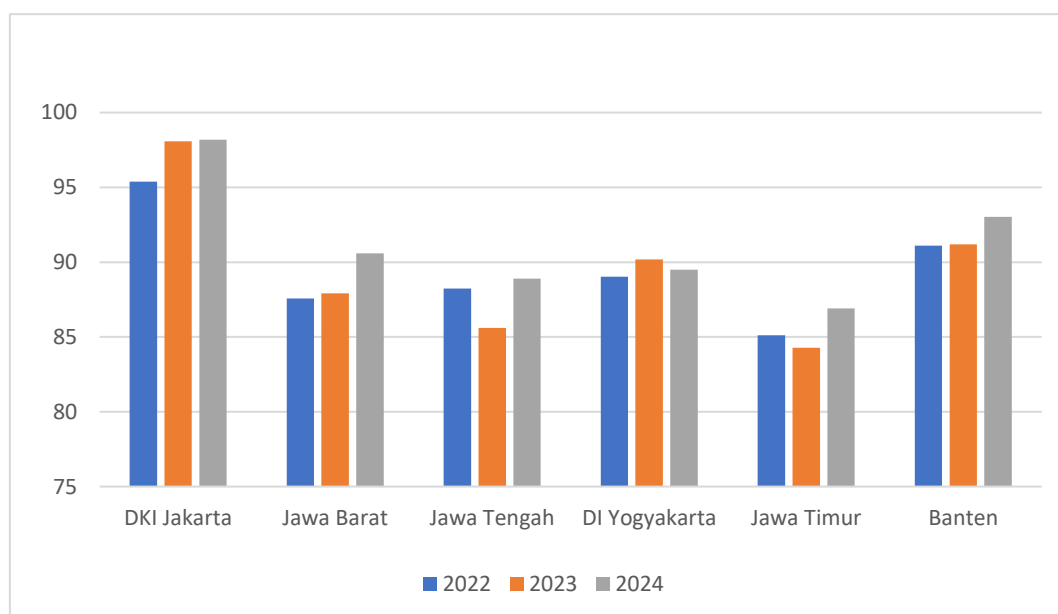
Berdasarkan gambar di atas, terlihat adanya dinamika investasi domestik yang berbeda antarprovinsi. DKI Jakarta secara konsisten menjadi provinsi dengan realisasi PMDN tertinggi dan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan hingga tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan peran DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional, pusat keuangan, serta lokasi utama kantor pusat perusahaan yang mendorong tingginya aliran investasi domestik. Jawa Timur dan Banten juga menunjukkan nilai PMDN yang relatif tinggi dan cenderung meningkat, yang mengindikasikan kuatnya daya Tarik wilayah ini sebagai kawasan industri dan perdagangan, didukung oleh infrastruktur serta kedekatan dengan pasar utama. Sebaliknya, Jawa Tengah meskipun mengalami peningkatan PMDN pada tahun 2024, masih berada di bawah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa investasi domestik di Jawa Tengah mulai berkembang, namun belum sekuat provinsi dengan basis industri dan aglomerasi ekonomi yang lebih

matang. Jawa Barat memperlihatkan fluktuasi yang cukup tajam, khususnya penurunan PMDN pada tahun 2024, yang dapat mengindikasikan adanya relokasi investasi, perubahan iklim usaha, atau pergeseran fokus investasi ke provinsi lain. Sementara itu, DI Yogyakarta mencatat PMDN terendah di antara enam provinsi, mencerminkan keterbatasan skala ekonomi dan dominasi oleh sektor jasa dan pendidikan yang relatif kurang menarik bagi investasi domestik berskala besar.

Fenomena perbedaan PMDN antarprovinsi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa konsentrasi investasi domestik masih terpusat pada wilayah dengan keunggulan infrastruktur, akses pasar, dan kemudahan berusaha. Provinsi yang memiliki kawasan industri, konektivitas logistik yang baik, serta kepastian regulasi cenderung lebih mampu menarik PMDN dalam jumlah besar. Sebaliknya, provinsi dengan keterbatasan lahan industri, skala pasar yang lebih kecil, atau struktur ekonomi berbasis sektor non-industri cenderung menerima PMDN yang lebih rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa investasi domestik berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi antarwilayah apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pemerataan investasi, sehingga PMDN menjadi variabel penting dalam menjelaskan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita antarprovinsi di Pulau Jawa.

Meskipun investasi domestik berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pendukung, salah satunya akses internet. Akses internet yang memadai memungkinkan peningkatan efisiensi usaha, perluasan pasar, serta percepatan adopsi teknologi dan inovasi,

sehingga investasi yang masuk dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Oleh karena itu, perbedaan tingkat penetrasi akses internet antarprovinsi berpotensi memengaruhi efektivitas investasi dalam meningkatkan produktivitas dan PDRB per kapita, hal ini menjadikan akses internet sebagai variabel penting dalam analisis pertumbuhan ekonomi regional.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah 2026)

Gambar 1. 6 Penetrasi Akses Internet 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2022-2024 (%)

Berdasarkan gambar data penetrasi akses internet di Pulau Jawa periode 2022-2024 terlihat bahwa tingkat penetrasi internet di seluruh provinsi relatif tinggi dan cenderung meningkat, antara lain yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten yang mengalami kenaikan akses internet secara konsisten setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya penguatan ekosistem dan sosial berbasis digital. DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi nasional memiliki infrastruktur telekomunikasi yang sangat maju, didukung oleh tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi sehingga adopsi internet terus

meningkat. Jawa Barat dan Banten diuntungkan oleh kedekatannya dengan DKI Jakarta serta perkembangan kawasan industri dan perkotaan baru, yang mendorong kebutuhan akan konektivitas digital baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun layanan publik. DI Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata, di mana tingginya populasi pelajar, mahasiswa, dan pelaku ekonomi kreatif mendorong penggunaan internet secara intensif dan berkelanjutan. Kenaikan yang konsisten di provinsi-provinsi tersebut mencerminkan bahwa pembangunan infrastruktur digital yang merata, dikombinasikan dengan karakteristik masyarakat yang adaptif terhadap teknologi, berperan penting dalam meningkatkan penetrasi internet dari waktu ke waktu.

Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami fluktuasi akses internet. Penurunan pada tahun 2023 diduga dipengaruhi oleh faktor struktural dan demografis, seperti luasnya wilayah, besarnya jumlah penduduk, serta masih adanya keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di daerah perdesaan. Ketimpangan kualitas jaringan, penurunan daya beli masyarakat, dan tingkat adopsi teknologi yang relatif lebih rendah di sebagian wilayah turut berkontribusi terhadap penurunan akses internet. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan akses internet dipengaruhi tidak hanya oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh faktor sosial-ekonomi dan karakteristik wilayah.

Peningkatan akses internet berkaitan erat dengan kenaikan PDRB per kapita karena berperan sebagai infrastruktur ekonomi digital yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Internet memperluas peluang usaha melalui digitalisasi UMKM, e-commerce, dan ekonomi kreatif, serta mempercepat akses informasi,

adopsi teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan daring. Kondisi ini mendorong peningkatan output ekonomi yang tercermin pada kenaikan PDRB per kapita. Dengan demikian, semakin luas akses internet, semakin besar potensi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Keempat variabel, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Akses Internet saling berkaitan dalam memengaruhi PDRB per kapita. Rata-Rata Lama Sekolah meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang tercermin pada Upah Minimum Provinsi. Upah yang memadai mendorong daya beli masyarakat serta menciptakan iklim yang menarik bagi Penanaman Modal Dalam Negeri. Selanjutnya, peningkatan investasi mendorong pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada kenaikan PDRB per kapita. Akses internet berperan sebagai faktor pendukung dengan meningkatkan efisiensi produksi, memperluas akses pasar, mempercepat adopsi teknologi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga memperkuat pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap PDRB per kapita.

Hubungan antara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Upah Minimum Provinsi (UMP), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Akses Internet terhadap PDRB per kapita penting untuk dikaji karena karakteristik antarprovinsi di Pulau Jawa menunjukkan pola yang berbeda. PDRB per kapita diukur secara bruto, yaitu mencerminkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi tanpa memperhitungkan depresiasi aset, sehingga menjadi indikator penting dalam menggambarkan kapasitas ekonomi dan pembangunan suatu daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan (*novelty*). Pertama, berfokus pada Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi nasional yang memiliki disparitas antarprovinsi yang tinggi. Kedua, menggunakan data panel enam provinsi periode 2016–2024 sehingga mampu menggambarkan dinamika hubungan antarvariabel secara lebih komprehensif. Ketiga, berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menggunakan cakupan nasional atau hanya satu provinsi, penelitian ini memberikan analisis yang lebih kontekstual mengenai faktor-faktor yang memengaruhi PDRB per kapita di Pulau Jawa.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme pembangunan ekonomi regional di pusat ekonomi nasional, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi disparitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi model analisis untuk wilayah-wilayah ekonomi strategis lainnya di Indonesia.

Berdasarkan fenomena, masalah, urgensi, *research gap* dan *novelty* yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Akses Internet terhadap PDRB Per Kapita di Pulau Jawa tahun 2026-2024.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah penelitian tersebut maka dapat diidentifikasi terkait dengan permasalahan sebagai berikut:

- a) Bagaimana pengaruh Rata-rata lama sekolah, upah minimum provinsi, penanaman modal dalam negeri, dan akses internet secara parsial terhadap PDRB per kapita di Pulau Jawa pada tahun 2016-2024?
- b) Bagaimana pengaruh Rata-rata lama sekolah, upah minimum provinsi, dan akses internet secara bersama-sama terhadap PDRB per kapita di Pulau Jawa pada tahun 2016-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis dapat menguraikan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Rata-rata lama sekolah, upah minimum provinsi, penanaman modal dalam negeri, dan akses internet secara parsial terhadap PDRB per kapita di Pulau Jawa pada tahun 2016-2024.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Rata-rata lama sekolah, upah minimum provinsi, penanaman modal dalam negeri, dan akses internet secara bersama-sama terhadap PDRB per kapita di Pulau Jawa pada tahun 2016-2024.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1.4.1 Manfaat Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, manfaat yang diharapkan yaitu:

- a) Membantu penulis dalam menganalisa penelitian mengenai pengaruh Rata-rata lama sekolah, upah minimum provinsi, penanaman modal dalam negeri, dan akses internet terhadap PDRB per kapita di Pulau Jawa pada tahun 2016-2024.

- b) Memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan PDRB per kapita khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini. Hal ini juga menguji dan memperkuat relevansi teori *Human Capital*, teori Upah Efisiensi, teori Investasi, serta teori Teknologi dalam pertumbuhan ekonomi di konteks Indonesia modern.
- c) Memberikan perspektif baru mengenai digitalisasi dan pembangunan ekonomi. Dengan memasukkan variabel akses internet, penelitian ini mendorong integrasi aspek digital ekonomi ke dalam kajian ekonomi makro regional yang masih relatif baru dalam literatur Indonesia.
- d) Menjadi dasar penelitian lanjutan (*future research*) yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk studi lanjutan, seperti analisis sector-sektor tertentu di Pulau Jawa, perbandingan antar pulau, atau permodelan dengan variabel baru seperti kualitas Pendidikan, produktivitas tenaga kerja, atau indeks digitalisasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Sebagai acuan bagi para pemerintah provinsi di Pulau Jawa dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk melihat factor mana yang paling signifikan mendorong PDRB per kapita sehingga program pembangunan dapat lebih tepat sasaran seperti peningkatan akses Pendidikan atau digitalisasi ekonomi.
- b) Mendukung perumusan kebijakan upah yang lebih efektif, temuan mengenai pengaruh upah minimum terhadap PDRB per kapita ini dapat

membantu pemerintah menyesuaikan kebijakan upah agar tidak kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

- c) Menjadi pertimbangan bagi investor dan pelaku usaha, hal ini karena informasi terkait PMDN dan hubungannya dengan potensi investasi serta daerah yang memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
- d) Memberikan informasi bagi dinas Pendidikan dan komunikasi-informatika (Kominfo), jika variabel rata-rata lama sekolah atau akses internet berpengaruh signifikan maka instansi terkait dapat memperluas program-program peningkatan kualitas Pendidikan atau penguatan infrastruktur digital di provinsi-provinsi Jawa.
- e) Sebagai pedoman untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dalam hal ini pemerintah daerah dapat merencanakan strategi pembangunan yang lebih berorientasi pada peningkatan human capital, digitalisasi, dan iklim investasi agar PDRB per kapita dapat meningkat secara berkelanjutan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Pulau Jawa dengan 6 Provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana rata-rata lama sekolah, upah minimum provinsi, penanaman modal dalam negeri, dan akses internet saling mempengaruhi PDRB per kapita di Pulau Jawa.

